

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bonus demografi adalah ketika jumlah penduduk pada usia produktif (15-64 tahun) lebih besar daripada usia non-produktif. Menurut Syahadatin & Shaddiq (2023) bonus demografi adalah keuntungan ekonomis yang disebabkan oleh penurunan angka ketergantungan sebagai hasil proses penurunan fertilitas jangka panjang, sedangkan menurut UNFPA (2016) bonus demografi adalah potensi pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan dari perubahan struktur umur penduduk, dimana jumlah penduduk yang berada pada usia kerja (15-64 tahun) lebih banyak dari penduduk yang bukan usia kerja (0-14 tahun dan > 65 tahun). Bonus demografi di Indonesia diperkirakan akan mencapai puncaknya antara tahun 2030-2045, lebih dari 70% populasi saat ini usia produktif. Kondisi ini secara teoritis memiliki kemampuan untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja, yang pada akhirnya dapat meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB).

Menurut Andriani et al. (2018) bonus demografi tidak secara otomatis menghasilkan pertumbuhan ekonomi, sebaliknya itu bergantung pada kualitas pendidikan, keterampilan, dan kesempatan kerja yang tersedia. Memanfaatkan bonus demografi sangat penting karena menurut Bloom et al. (2003) bonus demografi hanya dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi jika pekerja muda memiliki akses ke pekerjaan yang produktif.

Tenaga kerja muda akan menganggur atau bekerja di sektor informal yang tidak produktif jika kesempatan kerja sedikit. Meskipun tingkat partisipasi angkatan kerja di Sumatera Barat relatif tinggi mencapai 70,28% pada Agustus 2024, kualitas kesempatan kerja masih menjadi masalah, karena sektor informal mendominasi dan keterampilan tenaga kerja muda masih rendah (BPS, 2024b). Secara teoritis, kesempatan kerja dapat dijelaskan melalui Teori Permintaan Tenaga Kerja yang dikemukakan oleh G. Borjas (2016) yang menyatakan bahwa permintaan tenaga kerja merupakan turunan dari permintaan terhadap barang dan jasa. Artinya, semakin tinggi permintaan terhadap output, maka semakin besar pula kebutuhan

tenaga kerja. Selain itu, teori modal manusia oleh Becker (1993) juga menjelaskan bahwa kualitas pendidikan, keterampilan, dan pengalaman kerja seseorang sangat mempengaruhi peluangnya untuk memperoleh pekerjaan.

Kondisi kesempatan kerja di Provinsi Sumatera Barat juga menunjukkan tantangan yang signifikan secara regional. Menurut data dari BPS (2025a) persentase penduduk usia muda (15-24 tahun) yang termasuk dalam kategori NEET di Sumatera Barat mencapai sekitar 21,31% pada tahun 2024, angka ini menunjukkan bahwa, sekitar satu dari lima penduduk usia muda di Sumatera Barat tidak bekerja, tidak sekolah, atau tidak mengikuti pelatihan. Selain itu, ada perbedaan dalam kesempatan kerja di tingkat regional, yang ditunjukkan oleh perbedaan di antara kabupaten dan kota seperti yang ditampilkan oleh tabel 1.1 di bawah ini.

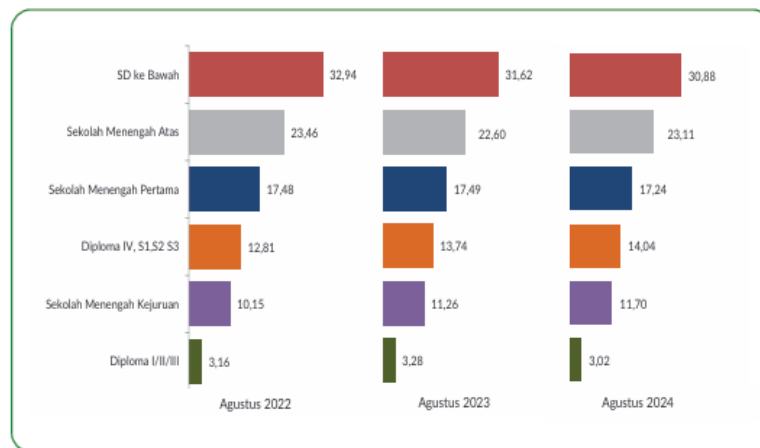
Tabel 1.1 Persentase Usia Muda (15-24 Tahun) yang Tidak Sedang Sekolah, Bekerja atau Mengikuti Pelatihan (NEET) Menurut Kabupaten/Kota (Persen)

Kabupaten/Kota	Persentase					
	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata
Kab. Kepulauan Mentawai	19,76	15,12	20,22	15,94	11,09	16,42
Kab. Pesisir Selatan	28,85	26,50	25,10	30,16	28,87	27,89
Kab. Solok	14,22	17,93	21,55	20,87	18,64	18,64
Kab. Sijunjung	21,14	20,23	32,14	32,68	29,74	27,18
Kab. Tanah Datar	15,10	14,09	17,00	20,93	19,25	17,27
Kab. Padang Pariaman	20,28	22,28	18,74	25,56	28,48	23,06
Kab. Agam	19,40	15,56	18,79	17,70	18,95	18,08
Kab. Lima Puluh Kota	17,13	12,45	15,58	19,79	19,59	16,90
Kab. Pasaman	25,61	24,16	21,92	30,00	27,05	25,74
Kab. Solok Selatan	22,79	22,31	17,50	21,16	18,15	20,38
Kab. Dharmasraya	21,77	19,28	26,11	17,62	21,73	21,30
Kab. Pasaman Barat	25,65	22,22	30,41	29,51	26,74	26,90
Kota Padang	18,98	17,55	15,77	20,46	14,80	17,51
Kota Solok	23,23	22,51	17,93	19,29	16,20	19,83
Kota Sawahlunto	25,24	24,52	21,15	21,20	17,54	21,93
Kota Padang Panjang	21,21	13,09	17,43	18,35	16,43	17,30
Kota Bukittinggi	14,83	12,48	11,33	14,61	11,20	12,89
Kota Payakumbuh	21,04	14,49	20,63	17,53	17,95	18,32
Kota Pariaman	15,08	14,48	16,12	21,58	15,64	16,58
Provinsi Sumatera Barat	20,46	18,78	20,23	23,00	21,31	20,75

Sumber: Data diolah dari BPS, 2025c

Dari data di atas, dapat dilihat bahwa, di Sumatera Barat tingkat NEET (*Not in Employment, Education, or Training*) sangat tinggi. Persentase NEET tertinggi dalam lima tahun terakhir adalah di Kab Pesisir Selatan sebesar 27,89% yang artinya hampir 3 dari 10 penduduk usia muda belum terlibat dalam aktivitas produktif baik di bidang ekonomi, maupun pengembangan keterampilan. Persentase NEET terendah dalam lima tahun terakhir adalah Kota Bukittinggi sebesar 12,89% yang artinya, 1 dari 8 penduduk usia muda di Bukittinggi tidak bekerja, tidak sekolah, dan tidak sedang pelatihan. Hal ini mengindikasikan bahwa kondisi ketenagakerjaan dan akses pendidikan yang relatif lebih baik dibandingkan dengan daerah lain.

Struktur tenaga kerja di Sumatera Barat menunjukkan bahwa sebagian besar karyawan masih berasal dari lulusan berpendidikan rendah. Menurut data dari BPS (2024c) komposisi tenaga kerja di Sumatera Barat masih didominasi oleh lulusan yang berpendidikan SD ke bawah yaitu sekitar 30,88%, sedangkan lulusan perguruan tinggi hanya sebesar 17,06%.



Gambar 1.1 Persentase Penduduk Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Provinsi Sumatera Barat, Agustus 2022–Agustus 2024

Sumber : BPS, 2024c

Ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan sangat penting untuk menentukan peluang kerja seseorang. Selain pendidikan, jenis kelamin juga mempengaruhi kesempatan kerja penduduk usia muda, karena tingkat kesempatan kerja penduduk usia muda laki-laki secara rata-rata lebih tinggi, yaitu sekitar 82,75% dibandingkan perempuan yang berada pada 57,75%. Kesenjangan ini menunjukkan adanya perbedaan partisipasi angkatan kerja berdasarkan gender di Sumatera Barat (BPS, 2026a).

Tabel 1.2 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin

Provinsi	Persentase	
	Laki-laki	Perempuan
Sumatera Barat	2024	2024
	82.75	57.75

Sumber : BPS, 2026a

Selanjutnya, berdasarkan status perkawinan, penduduk usia muda yang sudah menikah memiliki tingkat kesempatan kerja yang lebih tinggi, yaitu sekitar 75-80%, dibandingkan yang belum menikah yang berada pada kisaran 65-70%. Hal ini mencerminkan adanya dorongan ekonomi rumah tangga yang lebih kuat bagi kelompok yang telah menikah untuk terlibat dalam aktivitas ekonomi (BPS, 2024a). Sementara itu, dari aspek pelatihan kerja, rata-rata partisipasi penduduk usia muda dalam pelatihan masih relatif rendah, yaitu hanya sekitar 10-15% yang pernah mengikuti pelatihan bersertifikat, sedangkan sekitar 85-90% lainnya belum pernah mengikuti pelatihan. Rendahnya akses terhadap pelatihan ini menjadi salah satu faktor penghambat dalam meningkatkan daya saing tenaga kerja muda di pasar kerja (BPS, 2022).

Menurut ILO (2022) ketidaksesuaian antara keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan industri menjadi salah satu penyebab utama tingginya pengangguran usia muda secara global. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Sumatera Barat berdasarkan tabel 1.2 di bawah ini adalah sebesar 5,51%, termasuk dalam 10 provinsi dengan TPT tertinggi di Indonesia, angka ini lebih tinggi dibandingkan

rata-rata nasional sebesar 4.68%, sehingga mencerminkan adanya tantangan struktural dalam pasar tenaga kerja daerah.

Tabel 1.3 Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi (Persen), 2026

No.	Provinsi	TPT (%)	No.	Provinsi	TPT (%)
1	Papua	7.02	20	Kalimantan Barat	4.57
2	Kep. Riau	6.87	21	Papua Tengah	3.83
3	Jawa Barat	6.64	22	Kalimantan Utara	3.9
4	Banten	6.59	23	Lampung	3.95
5	Papua Barat Daya	6.41	24	Jambi	3.99
6	DKI Jakarta	6.03	25	Kalimantan Selatan	3.8
7	Aceh	5.88	26	Sulawesi Tenggara	3.25
8	Sulawesi Utara	5.75	27	Bengkulu	3.23
9	Maluku	5.8	28	Gorontalo	3.17
10	Sumatera Barat	5.51	29	Nusa Tenggara Timur	3.16
11	Kalimantan Timur	5.27	30	Nusa Tenggara Barat	2.99
12	Papua Selatan	5.25	31	Sulawesi Tengah	2.95
13	Sumatera Utara	5.01	32	Sulawesi Barat	2.93
14	Sulawesi Selatan	4.95	33	Jawa Timur	3.55
15	Maluku Utara	4.46	34	Kalimantan Tengah	3.44
16	Jawa Tengah	4.24	35	Sumatera Selatan	3.59
17	Papua Barat	4.1	36	DI Yogyakarta	3.05
18	Riau	4.09	37	Papua Pegunungan	1.7
19	Kep. Bangka Belitung	4.15	38	Bali	1.59
			39	Indonesia	4.68

Sumber: Data diolah dari BPS, 2026

Berdasarkan tabel diatas, Sumatera barat berada di atas provinsi-provinsi tetangga seperti Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan dinamika ketenagakerjaan antar provinsi di Sumatera, yang dapat membuka ruang analisis mengenai faktor-faktor spesifik lokal. Dengan TPT diatas rata-rata nasional, Sumatera Barat menjadi salah satu penyumbang penting dalam gambaran pengangguran Indonesia. Penelitian di provinsi ini dapat memberikan wawasan kebijakan yang relevan untuk menurunkan angka pengangguran secara nasional. Dalam analisis pasar tenaga kerja, TPT menunjukkan jumlah penduduk yang aktif mencari pekerjaan tetapi belum mendapatkan pekerjaan.

Berdasarkan data dari BPS (2025b) tingkat pengangguran terbuka di Sumatera Barat menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan antara kelompok umur selama periode 2020-2024. Secara umum, kelompok usia muda memiliki tingkat pengangguran yang tinggi, terutama yang berusia antara 15 dan 24 tahun, yang menurut standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dikategorikan “youth” dan

memiliki risiko yang lebih tinggi terhadap pengangguran karena kurangnya pengalaman kerja, keterampilan, dan akses ke informasi pasar kerja, informasi ini dapat dilihat pada tabel 1.2 di bawah ini.

Tabel 1.4 Tingkat Pengangguran Terbuka Berdasarkan Kelompok Umur

Kelompok Umur – UB	Persentase						Rata-rata Per Kelompok
	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata	
15-19	23,34	23,91	29,08	25,77	22,34	24,88	Usia Muda : 21,05
20-24	18,71	17,73	17,02	16,85	15,34	17,13	
25-29	9,77	9,26	7,13	7,48	7,14	8,15	Dewasa : 3,61
30-34	5,75	5,43	3,70	3,55	3,37	4,36	
35-39	4,32	4,02	2,65	2,54	2,25	3,15	
40-44	3,92	3,24	2,43	1,82	1,90	2,66	
45-49	3,54	3,30	2,33	1,80	1,71	2,53	
50-54	3,61	2,18	2,38	1,79	1,75	2,34	
55-59	3,21	1,98	2,37	1,52	1,59	2,13	
60 ke atas	1,70	2,73	2,85	1,28	1,49	2,01	Lansia : 2,01
Rata-rata	7,07	6,49	5,86	5,32	4,91	5,93	

Sumber: Data diolah dari BPS, 2025b

Kelompok umur 15-19 tahun dan 20-24 tahun tercatat sebagai kelompok dengan tingkat pengangguran tertinggi selama lima tahun terakhir yaitu sebesar 21,05%. Sementara itu, pada kelompok usia dewasa yang lebih matang seperti 25-29 tahun hingga 55-59 tahun, tingkat pengangguran cenderung lebih rendah dan relatif stabil sebesar 3,61%, dan pada kelompok lansia sebesar 2,01%. Ini menunjukkan bahwa, meskipun TPT Sumatera Barat secara keseluruhan adalah 5,62%, kelompok usia muda mungkin menyumbang sebagian besar angka tersebut.

Penelitian oleh Andriani et al. (2018) menemukan bahwa provinsi Sumatera Barat termasuk satu dari lima daerah di Indonesia yang tidak akan menikmati bonus demografi sepenuhnya. Ini karena rasio ketergantungan penduduk yang tinggi, proporsi penduduk usia non produktif, anak-anak, dan lansia masih tinggi dibandingkan dengan penduduk usia produktif, pemanfaatan penduduk usia kerja berpotensi terhambat oleh tantangan pada kualitas sumber daya manusia dan penyerapan tenaga kerja. Selain Sumatera Barat, empat provinsi lain yang tidak akan menikmati bonus demografi adalah Papua, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Sulawesi Barat. Dalam artikelnya Putro (2016) menyatakan bahwa peningkatan

proporsi usia produktif di Papua tidak secara otomatis menghasilkan pertumbuhan ekonomi, struktur demografi yang tidak dapat menghasilkan keuntungan ekonomi karena ketimpangan geografis, terutama antar wilayah pegunungan dan pesisir memperburuk kondisi ini. Indikator pembangunan manusia (IPM) yang rendah, tingkat kemiskinan yang tinggi, dan partisipasi kerja yang rendah terhadap rasio ketergantungan adalah hambatan utama untuk memanfaatkan bonus demografi di NTT menurut (Arifin, 2023).

Menurut Meo et al. (2025) Maluku berisiko tidak memperoleh bonus demografi secara optimal karena masih menghadapi ketimpangan pembangunan antar wilayah, terutama rendahnya akses pendidikan, minimnya fasilitas pelatihan kerja, dan keterbatasan infrastruktur ketenagakerjaan. Data dari BPS Sulawesi Barat (2026) menunjukkan bahwa meskipun *dependency ratio* menurun (49,12) dan total *fertility rate* mendekati *replacement level* (2,50), penyerapan tenaga kerja masih didominasi oleh sektor pertanian (50,83%) dan informal (71,77). Kondisi ini menandakan bahwa struktur demografi produktif belum diikuti oleh diversifikasi ekonomi, ketergantungan pada sektor primer berisiko menimbulkan stagnasi ekonomi, sehingga bonus demografi tidak dapat dimanfaatkan sepenuhnya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka diperlukan kajian lebih lanjut untuk memahami permasalahan yang terjadi, sehingga dapat dirumuskan berbagai pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh pendidikan terhadap kesempatan kerja penduduk usia muda di Sumatera Barat ?
2. Bagaimana pengaruh jenis kelamin terhadap kesempatan kerja penduduk usia muda di Sumatera Barat ?
3. Bagaimana pengaruh status perkawinan terhadap kesempatan kerja penduduk usia muda di Sumatera Barat ?
4. Bagaimana pengaruh pelatihan terhadap kesempatan kerja penduduk usia muda di Sumatera Barat ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk melihat pengaruh pendidikan terhadap kesempatan kerja penduduk usia muda di Sumatera Barat
2. Untuk melihat pengaruh jenis kelamin terhadap kesempatan kerja penduduk usia muda di Sumatera Barat
3. Untuk melihat pengaruh status perkawinan terhadap kesempatan kerja penduduk usia muda di Sumatera Barat
4. Untuk melihat pengaruh pelatihan terhadap kesempatan kerja penduduk usia muda di Sumatera Barat

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Akademisi: Penelitian ini memberikan kontribusi signifikan dalam perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ekonomi tenaga kerja, sosiologi generasi, dan kebijakan ketenagakerjaan.
2. Bagi Pemerintah Daerah: Penelitian ini berfungsi sebagai landasan penelitian untuk membangun kebijakan ketenagakerjaan yang beradaptasi dengan kebutuhan penduduk usia muda.
3. Bagi Pemangku Kepentingan: Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk membuat strategi rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang lebih sesuai dengan nilai-nilai dan preferensi kerja penduduk usia muda.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif, tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan hubungan sebab-akibat. Fokus dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana pengaruh pendidikan, jenis kelamin, status perkawinan, pelatihan mempengaruhi tingkat kesempatan kerja penduduk usia muda. Dalam penelitian ini, terdapat empat variabel independen dan satu variabel dependen. Variabel dependen yang digunakan adalah kesempatan kerja penduduk usia muda, dan variabel independennya meliputi pendidikan, jenis kelamin, status perkawinan, dan pelatihan